BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara dapat dianggap baik jika pendapatan atau anggaran negara dapat memenuhi kebutuhan pada negeri serta kegiatan ekonomi dalam keadaan yang stabil dengan tingkat inflasi yang terhitung rendah. Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana yang akan masuk dan yang akan keluar dapat direncanakan serta dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan negara. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, akan tetapi pendapatan pada sumber daya alam tersebut dirasakan masih tidak dapat mencukupi pengeluaran negara.

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) ialah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan program – programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset – aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Freise *et al.*, (2008) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Penerimaan pajak yang diperoleh negara salah satunya dipungut dari perusahaan. Bagaikan dua sisi mata uang, selain menjadi salah satu kebutuhan perekonomian, pajak merupakan suatu beban karena mengurangi penghasilan mereka, dikarenakan para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Menurut peneliti hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain tidak diinginkan, sehingga muncul

perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti *et al* dalam Ida *et al*, 2019). *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) memang tidak melanggar hukum, akan tetapi pada umumnya semua pihak sepakat bahwa *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Cahyanti *et al.*, 2017). Pasal 18 undang-undang pajak penghasilan, terdapat peraturan spesifik anti avoidance rule yang digunakan untuk menurunkan praktik penghindaran pajak.

Upaya penghindaran pajak dapat dilihat dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak. (Suandy, 2011:101) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lain dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah kurang pajak yang telah ditetapkan (Resmi, 2012:34).

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengakui bahwa pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (suara.com). Selain mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan

pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.

Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak rill yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak Richardson dan Lanis (2007). Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan Liansheng *et al.*, (2007).

Indonesia termasuk ke dalam deretan negara dengan kasus penghindaran pajak terbanyak. Dilansir oleh penyidik dari IMF tahun 2016 berdasarkan survei, kemudian di analisa kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Beban pajak dapat dikurangi dengan cara, yang pertama dapat menggunakan penggelapan pajak, penggelapan pajak merupakan cara mengurangi beban pajak yang tidak dibenarkan karena melanggar undang – undang yang ada sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan *Tax avoidance*. Untuk mengurangi beban pajak yang diperbolehkan karena berdasarkan undang – undang yang ada yaitu *Tax avoidance* Batara *et al.*, (2015: 2).

Faktor lain yang berhubungan dengan penghindaran pajak adalah Intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas aset tetap kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Penghindaran pajak dalam intensitas aset adalah dalam hal depresiasi Dharma *et al.*, dalam Sundari *et al.*, (2017). Kepemilikan aset tetap

yang tinggi menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula. Beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* akan menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit Mulyani dalam Sundari *et al.*, (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi Intensitas Aset Tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda – beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan Budiman *et al.*, dalam Rizky *et al.*, (2018). Risiko perusahaan merupakan risiko terhadap nilai saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan Budiman *et al.*, dalam Rizky *et al.*, (2018). Semakin tinggi risiko nilai saham suatu perusahaan maka diindikasikan manajemen akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan di hadapan investornya.

Dalam dunia bisnis, politik sangatlah erat kaitannya. Disebabkan karena suatu bisnis yang berhasil tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. Perusahaan dinyatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara – cara tertentu memiliki hubungan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah Purwoto (2011).

Industri Barang Konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia. Sektor ini merupakan sektor yang memproduksi kebutuhan sehari – hari masyarakat. Sektor industri yang terdapat di dalamnya antara lain makanan dan minuman, kosmetik, rokok, farmasi dan peralatan rumah tangga lainnya, meskipun terjadi krisis namun masyarakat tetap membutuhkan konsumsi untuk sehari – hari dan hal itu merupakan kelebihan dari sektor ini. Sektor ini merupakan sektor yang stabil karena permintaannya yang juga stabil dan selalu bertumbuh seiring dengan

meningkatnya penduduk atau masyarakat Herlambang dalam Jelita dan Cahyaningsih (2019).

Industri Barang Konsumsi memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan perusahaan manufaktur. Berita yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia pada bulan Januari tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa perusahaan manufaktur terdapat satu sektor yang mengalami kelemahan indeks saham yaitu sektor aneka industri dengan persentase sebesar 1,4% dan terdapat dua sektor industri yang mengalami peningkatan pada indeks saham yaitu sektor industri dasar dan kimia dengan persentase sebesar 0,99% dan sektor industri barang konsumsi naik dengan persentase sebesar 3,02% ke level 2.394.536 dari pekan sebelumnya 2.324.281. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa industri barang konsumsi berhasil menjadi indeks sektor terkuat pada awal tahun 2017 diantara indeks sektor saham pada perusahaan manufaktur lainnya.

Menurut analis senior binaartha securities Reza Priyambada, menguatnya sektor industri barang konsumsi dipengaruhi oleh aksi beli yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Seperti, saham-saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang diketahui kedua saham emiten ini merupakan saham dengan berkapitalisasi besar (Mutmainah, 2017).

Industri manufaktur Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Seperti perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal – akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak.

"Saya kira dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan *tax planning* yang pada akhirnya berujung pada penghindaran pajak," ujarnya kepada detik Finance, Jumat (5/7/2019).

Penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap, risiko perusahaan dan koneksi politik terhadap *Tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun, dalam penelitian terdahulu masih banyak perbedaan dalam hal penelitiannya. Dalam penelitian Purwanti *et al.*, (2017) Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap *Tax avoidance* sedangkan, Sundari *et al.*, (2017) intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Rizky (2018) Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* sedangkan, Fitri (2015) Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. dan Shinta (2017) koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dan Bunga *et la.*, (2019) koneksi politik juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari intensitas aset tetap, risiko perusahaan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang pengaruh intensitas aset tetap, risiko perusahaan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan juga banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Risiko Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*”**.

1.2.Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal – hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *Tax avoidance*.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Teoritis

1. Manfaat bagi penulis

Sebagai salah satu hasil pemikiran sendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan khususnya intensitas aset tetap, risiko perusahaan dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat bagi pembaca

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan dalam perpajakan khususnya penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2. Praktis

1. Manfaat bagi Universitas

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi akademik dalam menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen laba khususnya yang berkaitan dengan intensitas aset tetap, risiko perusahaan dan koneksi politik berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa/ mahasiswi yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

2. Manfaat bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Agar dapat menjadi Perusahaan yang lebih baik dan lebih berkembang dari tahun – tahun sebelumnya.
3. Manfaat bagi pemerintah
Sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak.